

**PERANAN KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA CUKAI TELUK  
BAYUR DALAM MENGATASI PEREDARAN ROKOK ILEGAL DAN PITA CUKAI  
PALSU DI KOTA PADANG**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh:**

**RAHMAT HIDAYAT**  
**NPM. 1910012111006**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No. Reg : 14/Skripsi/HTN/FH/VII-2024**

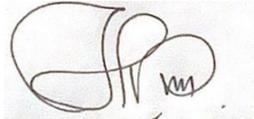
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY**

No. Reg: 14 / Skripsi/HTN/FWV11-2024

Nama : RAHMAT HIDAYAT  
NPM : 1910012111006  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : PERANAN KANTOR PELAYANAN DAN  
PENGAWASAN BEA CUKAI TELUK BAYUR  
DALAM MENGATASI PEREDARAN ROKOK  
ILEGAL DI ROTA PADANG

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di upload ke website.



Nurbeti. S.H.,M.H (Pembimbing) (X Nurbeti, S.H., M.Hum)

# PERANAN KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA CUKAI TELUK BAYUR DALAM MENGATASI PEREDARAN ROKOK ILEGAL DAN PITA CUKAI PALSU DI KOTA PADANG

Rahmat Hidayat, Nurbeti, S.H., M.H.<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail:fajarfuatali05@gmail.com

## ABSTRACT

*One of the main functions of customs as a community protector is to protect the public from the circulation of illegal and dangerous goods. Based on Article 27 paragraph (2) of Law Number 28 of 2022, Cigarette Taxpayers are cigarette factory entrepreneurs/producers and cigarette importers who have a permit in the form of an Excisable Goods Entrepreneur Identification Number. Problem Formulation: 1) How is the implementation of the duties and authority of KPPBC Teluk Bayur in monitoring illegal cigarettes in Padang City? 2) What are the obstacles faced by KPPBC Teluk Bayur in monitoring illegal cigarettes in Padang City? 3) What are the efforts of KPPBC Teluk Bayur to overcome obstacles in monitoring the distribution of illegal cigarettes in Padang City? This type of research uses a sociological juridical approach. Data sources are primary data and secondary data, data collection techniques through interviews, document studies and qualitative data analysis. Research Results: 1) Duties and authorities of the Teluk Bayur Customs Service and Supervision Office in dealing with the circulation of illegal cigarettes in Padang City. 2) The obstacle faced by KPPBC Teluk Bayur in monitoring illegal cigarettes in Padang City is that there is still a lack of public awareness of the dangers of illegal cigarettes. There is still weak supervision and enforcement carried out by the authorities. Insufficient investigative staff in the customs and excise sector. 3) Efforts to overcome obstacles that hinder the effectiveness of monitoring the distribution of illegal cigarettes, one of which is through outreach.*

**programs.Keywords: the role of KPPBC illegal cigarettes**

## **I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia, rokok merupakan hal yang umum di jumpai di berbagai tempat statistik konsumsi rokok dunia pada tahun 2014 kembali meneguhkan posisi Indonesia sebagai salah satu negara konsumsi rokok terbesar sepanjang 2014 yang lalu, konsumsi rokok dunia mencapai 5,8 triliun batang, 240 miliar batang (4.14 persen) di antaranya dikonsumsi oleh perokok Indonesia angka konsumsi rokok ini menempatkan Indonesia sebagai negara pengonsumsi rokok terbesar ke empat dunia setelah negara China (2,57 triliun batang), Rusia (321 miliar batang), dan Amerika Serikat (281 miliar batang) Konsumsinya perlu dikendalikan.

1. Peredarannya perlu diawasi
2. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup

3. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

Pita Cukai adalah tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat dengan spesifikasi dan desain tertentu yang digunakan sebagai bukti pelunasan cukai dan sekaligus sebagai alat pengawas dalam rangka pengamanan penerimaan Negara, dimanadari produksi hasil tembakau yang banyak beredar ditengah masyarakat adalah rokok yang dikemas untuk penjualan eceran akan tetapi tidak dilekati dengan pita cukai atau yang sering disebut dengan rokok polos rokok polos ini dikategorikan sebagai rokok ilegal.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Terntang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Terntang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerirntah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan derngan mermemberikan kewenangan yang seluasluasnya, disertai dengan pemberian

hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis telah melakukan penelitian dengan judul: **PERANAN KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA CUKAI TELUK BAYUR DALAM MENGATASI PEREDARAN ROKOK ILEGAL DAN PITA CUKAI PALSU DI KOTA PADANG**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangan KPPBC teluk bayur dalam melakukan pengawasan rokok ilegal Di Kota Padang.
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi KPPBC teluk bayur dalam melakukan pengawasan rokok ilegal Di Kota Padang.
3. Apa upaya-upaya KPPBC teluk bayur untuk mengatasi kendala-kendala dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal Di Kota Padang

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa pelaksanaan tugas dan kewenangan KPPBC teluk bayur dalam melakukan pengawasan rokok ilegal Di Kota Padang
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi KPPBC teluk bayur dalam melakukan pengawasan rokok ilegal DI KOTA PADANG
3. Untuk menganalisa upaya-upaya KPPBC teluk bayur untuk mengatasi kendala-kendala dalam melakukan pengawasan rokok ilegal Di Kota Padang

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan

mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum  
Sumber Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi dokumen, observasi, wawancara bersama Bapak Indra suahyo Selaku Kepala Kantor KPPBC Teluk Bayur Kota Padang

Teknik analisis data yang diterapkan oleh peneliti ialah pendekatan analisis kualitatif, analisisnya berupa deskripsi/kalimat menyeluruh yang memuat beragam indikasi serta kenyataan yang ditemukan di lapangan terkait dengan masalah yang ditangani.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangan Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Cukai Teluk Bayur Dalam Mengatasi Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Padang**

- Pelaksanaan dan tugas Kppbc adalah
1. Pelaksanaan Intelejen, patroli, dan pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai serta pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.
  2. Penyelidikan dibidang kepabeanan dan cukai.
  3. Pengolahan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.
  4. Pelaksanaan pemungutan bea masuk, cukai dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh DJBC serta pelaksanaan perbendaharaan penerimaan, penangguhan, penagihan, pengembalian bea masuk dan cukai.
  5. Penerimaan pelayanan teknis dan kemudahan dibidang bea dan cukai.
  6. Penelitian dokumen pemberitahuan ekspor dan impor barang, nilai pabean, dan fasilitas impor, pemeriksaan
  7. Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, nilai pabean dan sanksiadministrasi berupa denda
  8. Pelayanan atas masuk pemuatan, pembongkaran dan penimbunan barang

dan pengawasan pengeluaran barang ke dan dari kawasan pabean.

9. Penelitian dokumen cukai, pemeriksaan pengusaha kena cukai dan uraian perusahaan pita cukai.
10. Pembukuan dokumen kepabeanan dan cukai serta dokumen lainnya.

### **B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi KPPBC Teluk Bayur dalam Melakukan Pengawasan Rokok Ilegal Di Kota Padang**

Berikut adalah kendala yang dihadapi KPPBC Teluk Bayur Dalam Melakukan Pengawasan Rokok Ilegal DI Kota Padang, yaitu sebagai berikut.

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok illegal
2. Masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat
3. Tenaga penyidik yang kurang dari sektor bea dan cukai

Upaya lanjutan yang dilakukan oleh dinas instansi terkait terhadap upaya mengatasi permasalahan terkait efektifitas pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal adalah melalui evaluasi langsung dilapangan, adapun kegiatan evaluasi langsung dilapangan diantaranya melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan pengusaha pabrik, pemantauan harga transaksi pasar, monitoring pelaporan produksi barang kena cukai yang selesai dibuat.

### **C. Upaya-Upaya KPPBC Teluk Bayur Untuk Mengatasi Kendala-Kendala dalam Melakukan Pengawasan Rokok Ilegal Di Kota Padang.**

1. Bekerja Operasi Penindakan: KPPBC rutin melakukan operasi penindakan di berbagai daerah untuk menemukan dan menyita rokok ilegal. Operasi ini sering kali dilakukan bersama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi dan TNI.
2. Patroli dan Pengawasan: Melakukan patroli darat, laut, dan udara untuk mengawasi jalur distribusi rokok ilegal. Pengawasan dilakukan di daerah rawan

seperti pelabuhan, perbatasan, dan tempat penyimpanan.

3. Edukasi dan Sosialisasi: Mengadakan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya rokok ilegal dan pentingnya membeli rokok yang legal. Edukasi ini juga diberikan kepada pedagang untuk tidak menjual rokok ilegal.
4. Kerjasama Antar Instansi: Bekerjasama dengan instansi lain seperti Kepolisian, TNI, dan Pemerintah Daerah untuk memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap rokok ilegal.
5. Penggunaan Teknologi: Menggunakan teknologi canggih untuk mendeteksi dan melacak peredaran rokok ilegal. Misalnya, penggunaan X-ray dan scanner untuk memeriksa kontainer dan kendaraan yang dicurigai membawa rokok ilegal

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan peredaran rokok ilegal dapat ditekan dan memberikan dampak positif bagi penerimaan negara dari sektor cukai rokok.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Maka berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dinas instansi terkait adalah merlalui perngendalian produksi di wilayah permasok cukai hasil tembakau ilegal dan pengendalian peredaran di wilayah peredaran cukai hasil tembakau ilegal, serlain itu pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal juga dilakukan merlalui koordinasi derngan instansi terkait, sedangkan penegakan hukumnya merlalui penindakan dan penyrdikan (P2) dalam melakukan penindakan dan penegakan peraturan terhadap rokok illegal.
2. Kendala yang dihadapi KPPBC Teluk Bayur dalam melakukan pengawasan rokok illegal di Kota Padang.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dinas instansi terkait dalam rangka efektifitas pengawasan peredaran rokok ilegal adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat

terhadap rokok ilegal, masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, masih kurangnya kesadaran produsen rokok dalam memproduksi rokok ilegal (keuntungan dengan modal dagang yang kecil), masih lemahnya aturan atau regulasi terhadap peredaran rokok ilegal, dan adanya kenaikan tarif cukai.

3. Upaya-Upaya KPPBC Teluk Bayur untuk mengatasi kendala dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal di Kota Padang.

Upaya yang dilakukan KPPBC Teluk Bayur untuk mengatasi kendala dalam melakukan pengawasan rokok ilegal.

Bersifat administratif maupun fisik, dengan cara melakukan pengawasan terhadap segala bentuk perbuatan maupun tidak berbuat yang berakibat terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang yang berlaku yang merugikan negara secara langsung atau tidak dan atau mempermudah terjadinya kerugian negara

## **B. Saran**

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal yang disertai dengan lemahnya aturan atau regulasi terhadap peredaran rokok ilegal.
2. Sebaiknya masyarakat di beri pemahaman akan bahaya rokok ilegal sehingga masyarakat mengerti mengkonsumsi rokok ilegal selain mengganggu kesehatan dapat juga merugikan negara.
3. Pemerintah dan bea cukai pabean b Kota Padang dalam menjalankan tugasnya (merngawasi peredaran rokok ilegal) harus berdasarkan Undang-Undang yang berrlaku dan memberikan sanksi yang tergas bagi yang melanggar aturan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU-BUKU**

Eddhi Sutarto, 2010, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Jakarta: Erlangga

Warta Bea Cukai. 2007. *Pengawasan yang Bagaimana yang Harus Dilakukan DJBC*. Kantor Pusat DJBC Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanaan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

### **C. Sumber Lainnya**

Bea Cukai Teluk Bayur Musnahkan 63 Juta Batang Rokok Ilegal  
<https://www.beritasatu.com/nusantara/1061387/beat-cukai-teluk-bayur-musnahkan-63-juta-batang-rokok-ilegal>

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing saya ibuk Nurbeti S.H,M.H, selalu sabar dalam membimbing dan memberikan masukan kepada si penulis agar menjadi lebih baik